AG NO : 654
TGL TERIMA : 08-03-17
PARAF :

IAIN
BATUSANGKAR

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah
Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

EDI CHANDRA
Nim : 11 203 038

JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
2017 M / 1437 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **EDI CHANDRA**

NIM : 11 203 038

Tempat/tanggal lahir : Bongkal Malang/21 09 1992

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **"ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR."** adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 10 Februari 2017

Saya yang Menyatakan,



EDI CHANDRA

NIM. 11 203 038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas Nama **Edi Chandra, NIM 11 203 038** judul: **"Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan pada Sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, februari 2017

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA	**Sri Adella Fitri, SE., M.Si**
NIP. 19740623 200003 2 002	**NIP. 19830713 200604 2 002**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar

Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh EDI CHANDRA, NIM. 11 203 038 berjudul **"Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar"**, telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekomomi (S.E) strata satu (S.1) dalam Program Studi Akuntansi Syariah.

No	Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA NIP. 19740623 200003 2 002	Ketua Sidang		7/3 2017
2	Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP. 19830713 200604 2 202	Sekretaris Sidang		06/-17/03
3	Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM NIP. -	Anggota		06/-17/03
4	Desy Farina, SE., M.Si NIP. -	Anggota		03/-17/03

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar

Nasfizar Gusrendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

ABSTRAK
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATENTANAH DATAR

Edi Candra, 11 203 038, judul skripsi " Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar." Jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2017.

Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pertumbuhan Belanja dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertumbuhan Belanja dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar..

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 16 November tahun 2016 sampai 16 Januari tahun 2017.

Dari hasil penelitian penulis di DPPKA Kabupaten Tanah Datar tentang Pertumbuhan Belanja dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tanah Datar positif karena tidak ada pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 yang negatif. Dan rata-rata pertumbuhan belanjanya adalah 12%. Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai tahun 2015 sangat efisien. Rata-rata rasio efisiensi Belanja Daerah adalah 89,46% karena dilihat dari tingkat efisiensi <90%. Efisiensi Belanja Operasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai tahun 2015 efisien. Rata-rata Efisiensi Belanja Operasi adalah 91,26% karena dilihat dari tingkat efisiensi berada di 90% s.d. 99%. Efisiensi Belanja Modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai tahun 2015 sangat efisien. Rata-rata efisiensi belanja modal adalah 81,23% karena dilihat dari tingkat efisiensi <90%.

Kata kunci : Laporan Realisasi Anggaran

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam untuk arwah junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, selaku pembawa risalah kebenaran, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, setelah dilakukannya penelitian sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi S1 di IAIN Batusangkar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menemukan banyak kesulitan. Hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Namun berkat rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR".** Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua, Ayahanda Yusrizal dan Ibunda Ida yang tiada henti memberikan untaian do'a terbaik dengan ketulusan hati demi keberhasilan dan kesuksesan penulis, serta memberikan bantuan baik spritual maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Batusangkar Bapak Dr. H. Kasmuri, MA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Nasfizar Guspendri, SE.,M.Si yang telah memberikan izin ke pada penulis untuk melaksanakan penelitian.

3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Gampito, SE.,M.Si yang telah memberikan bimbingan.
4. Dosen Pembimbing Akademik ibuk Khairani, SE., AKT., CA yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi S1.
5. Dosen Pembimbing Skripsi ibuk Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA dan ibuk Sri Adella Fitri, SE., M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
6. Dosen penguji skripsi Bapak Khairul Marlin, SE., M.Kom yang telah memberikan masukan-masukan dan saran-saran terbaik sehingga penulis bisa mengetahui kesalahan dan dapat memperbaiki kesalahan yang ada di dalam skripsi penulis ini.
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Tanah Datar.
8. Teman-teman seperjuanganku dan semua Teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat khilaf dan kekeliruan, baik secara teknis maupun isinya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, 10 Februari 2017

Penulis,



EDI CHANDRA
NIM: 11 203 038

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identufikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 9

BAB II KAJIAN TEORI
A. Akuntansi Sektor Publik
1. Defenisi Akuntansi Sektor Publik 10
2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 11
B. Pengukuran Kinerja Pemeintah Daerah
1. Tujuan Pemerintah Daerah 11
2. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah 12
3. Fokus Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah 14
C. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Pentingnya Laporan Keuangan Daerah 15
2. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 15
3. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 15
4. Perlunya Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 16
5. Dampak Pelaporan Keuangan yang Buruk 16
6. Karakteristik Kualitatif Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah . 17
7. Jenis-jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 18

D. Laporan Realisasi Anggaran
1. Pendapatan 19
2. Belanja 20
3. (Belanja) transfer 21
4. Surplus/defisit 21
5. Pembiayaan 21
6. SiLPA/SiKPA 22
E. Belanja Daerah
1. Belanja Daerah 23
2. Analisis Belanja Daerah 25
a. Analisis varians belanja 25
b. Analisis pertumbuhan belanja 26
c. Analisis keserasian belanja 27
d. Rasio efisiensi belanja 28
F. Penelitian yang Relevan 29
G. Defenisi Operasional 31
H. Kerangka Berpikir 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 33
B. Waktu dan Tempat Penelitian 33
C. Tujuan Penelitian 33
D. Jenis dan Sumber Data 34
E. Metode Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 34
1. Analisis pertumbuhan belanja 34
2. Rasio efisiensi belanja 36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 38
   1. Sejarah Singkat Kantor DPPKA Kabupaten Tanah Datar 38
   2. Visi dan Misi 38
   3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan 39
      a. Tujuan 39
      b. Sasaran 40
      c. Strategi 40
      d. Kebijakan 40
   4. Tugas Pokok dan Fungsi 41
   5. Struktur Organisasi 42
      a. Struktur Organisasi 42
      b. Susunan Organisasi 43
      c. Sekretariat mempunyai Fungsi 43
   6. UPT Pelayanan BPHTB & PBB 47

B. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar
   1. Analisis Pertumbuhan Belanja 48
      a. Temuan Penelitian 48
      b. Hasil Penelitian 49

C. Analisis Rasio Efisiensi Belanja pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
   1. Rasio Efisiensi Belanja 52
      a. Temuan Penelitian 52
      b. Hasil Penelitian 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Anggaran Belanja 2011-2015	6
Tabel 1.2	Laporan Anggaran Belanja Operasi 2011-2015	6
Tabel 1.3	Laporan Anggaran Belanja Modal	6
Tabel 3.1	Skala Pertumbuhan Belanja	35
Tabel 3.2	Kriteria Tingkat Efisiensi menurut Muhammad Mahsun	36
Tabel 3.3	Kriteria Tingkat Efisiensi menurut Mahmudi	37
Tabel 4.1	Anggaran dan Realisasi Belanja	49
Tabel 4.2	Skala Pengukuran pertumbuhan Belanja	50
Tabel 4.3	Pertumbuhan Belanja	50
Tabel 4.4	Anggaran dan Realisasi Belanja	52
Tabel 4.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	53
Tabel 4.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	53
Tabel 4.7	Kriteria Tingkat Efisiensi	53
Tabel 4.8	Rasio Efisiensi Belanja	64
Tabel 4.9	Rasio Efisiensi Belanja Operasi	65
Tabel 4.10	Rasio Efisiensi Belanja Modal	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Akibat Laporan Keuangan yang Buruk 17
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....32

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.[1]

Sedikit diketahui, pengukuran kinerja suatu organisasi tidak mungkin dapat dilakukan sebelum kita mengetahui terlebih dahulu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau entitas tersebut. Hal ini karena pengukuran kinerja sebetulnya merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi, misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintah kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1). Secara umum tujuan Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Mengumpulkan dan mengalokasikan/mendistribusikan sumber daya

[1]Abdul Halim, *akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM Yogyakarta, 2007),hal.99

Karakteristik Pemda sebagai organisasi non laba (*pure nonprofit organisation)* menempatkan organisasi ini mempunyai keunikan yang sangat berbeda dengan perusahaan bisnis. Pemda mempunyai tanggung jawab besar di bidang ekonomi dan sosial secara bersama. Pengukuran kinerja Pemda harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup:

1. Kondisi Ekonomi Nasional
2. Lingkungan Bisnis
3. Stabilitas dan Pengembangan
4. Kesehatan
5. Pendidikan

Pengukuran kinerja pemda berarti pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas dilingkungan pemda. [2]

Laporan Realisai Anggaran merupakan bukti pertanggung jawaban pemerintah terhadap daerahnya, yang menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja (APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Aanggaran menyajikan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiyaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Salah satu komponen di Laporan Realisasi Anggaran adalah belanja daerah, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*Publik Fund)* melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang

[2] Muhammad Mahsun, *Pungukuran kinerja Sektor Publik,*(Yogyakarta : BPFE,2013),hal195-198

relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya efisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan[3].

Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas di rekening kas umum daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah.[4]

Berdasarkan standar akuntansi pemerintah, belanja daerah dapat didefenisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, belanja daerah meliputi: belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksaan program.[5]

Anggaran pemerintah daerah adalah rencana kegiatan yang di prensentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran merupakan dokumen yang mengambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas, dan mengenai estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Dan sistem penyelenggara pemerintah di Indonesia anggaran yang

---

[3] Chrisman Youlli Karinda, *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, (Sulawesi, 2013), hal.2

[4] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016),hal.153

[5] Nunuy Nur Afiah, *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2010),Hal.15-16

disusun oleh pemerintah daerah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).[6]

APBD memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

1. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, yaitu bahwa anggaran harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian.[7]

Salah satu fungsi anggaran yaitu fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan, untuk mengetahui hal tersebut maka dibutuhkan LRA atau laporan realisasi anggaran, Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang perbandingan antara anggaran dan realisasinya, menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[8]

---

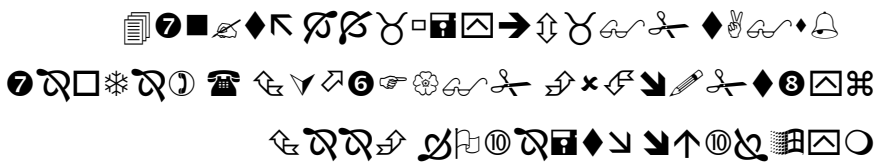
[6] Abdul Halim, *akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*,,,,hal.36

[7] Ahmad Yani, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2008),hal.370

[8] Standar Akuntansi Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010*,(Bandung : Fokusmedia, 2011), hal.79

Dalam kaitannya terhadap Islam, Islam juga mengingatkan umatnya untuk memperhatikan hasil keuangan. Setiap orang diharapkan memiliki kebiasaan mengevaluasi, menimbang dan mengukur hasil keuanganya.

Firman Allah SWT dalam Surah (Yusuf : 55)



Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan bahwasanya orang-orang yang bekerja di bidang keuangan atau perbendaharaan adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan berilmu pengetahuan.[9] Firman Allah SWT Sejalan dengan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang harus dipertanggungjawabkan.

Laporan realisasi anggaran harus dibuat oleh setiap instansi pemerintah. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar adalah Salah satu organisasi sektor publik yang mempunyai peran penting sebagai penunjang keberlangsungan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar.

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah"pesan, Kesan, dan keserasian Alqur'an"*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000) Jilid 7.

Berikut adalah anggaran belanja Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015.

Tabel 1.1 Laporan Anggaran Belanja 2011-2015

Tahun	Anggaran
2011	734.107.271.660,68
2012	809.818.357.564,97
2013	959.840.142.571,31
2014	1.087.354.767.167,27
2015	1.167.510.347.645,96

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015

Tabel 1.2 Laporan Anggaran Belanja Operasi 2011-2015

Tahun	Anggaran
2011	615.803.874.912,53
2012	666.450.882.439,02
2013	784.452.906.728,00
2014	898.548.216.275,83
2015	996.440.733.761,96

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015

Tabel 1.3 Laporan Anggaran Belanja Modal 2011-2015

Tahun	Anggaran
2011	115.834.646.748,15
2012	112.232.930.933,00
2013	138.387.221.009,00
2014	139.690.850172,00
2015	168.528.566.229,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015

Pengukuran efisiensi untuk menilai kinerja pemerintah pada dasarnya bukan pada masalah teknis pengukuran yang sempit, tetapi lebih merupakan masalah konsep dasar. Konsep efisiensi lahir dari model sistem produksi. Model ini secara parsial menggambarkan organisasi pemerintah yang didalamnya terdapat keterbatasan menyangkut kelayakan model tersebut sebagai konsep normatif yang ideal. Pemerintah bukan perusahaan yang mengejar kapasitas produksi dan laba, sehingga konsep pengukuran efisiensi akan berbeda dengan model sistem produksi perusahaan. Pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah perlu diperluas sampai pada pengukuran *outcome*.[10]

Dapat dilihat dari tabel anggaran belanja daerah pemerintahan Kabupaten Tanah Datar di atas, di tiap tahun periode anggaran, anggaran belanja cenderung terus meningkat. Begitu juga dengan anggaran belanja modal dan belanja operasi, setiap tahun periode anggaran selalu meningkat tapi, apakah anggaran tersebut sudah terealisasi seperti yang diharapkan, apakah belanja daerahnya sudah efisien dan bagaimana pertumbuhan belanjanya.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap belanja daerah untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar".**

[10] Mahmudi, *manajemen sektor publik*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2007),hal.3-4

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apakah Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah terealisasi dari tahun 2011 sampai tahun 2015 ?
3. Bagaimana Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 ?
4. Bagaimana Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 ?
5. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan Anggaran Belanja Daerah yang telah disusun sebelumnya ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 ?
2. Bagaimana Efisiensi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan 2015 ?

D. Rumusan Masalah.

Dari batasan masalah dapat penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu, apakah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sudah Efisien dalam merealisasikan Anggaran Belanja Daerah yang ada, dilihat dari Anggaran Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011 sampai dengan 2015?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pertumbuhan Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan 2015 ?
2. Untuk menganalisis Efisiensi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan 2015 ?

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

   Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Bagi Pemerintahan

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan saran bagi Pemerintah Daerah khususnya Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

3. Bagi pihak lain
   a. Memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian pada waktu mendatang.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu penelitian yang lebih lanjut dalam bidang kajian ini

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Defenisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik juga merupakan suatu manajemen keuangan yang sumbernya berasal publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggung jawabkan kepada publik, akibatnya pengelolaanya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik.

Organisasi sektor publik yang menggunakan dana publik / dana masyarakat adalah :

a. Organisasi pemerintah pusat
b. Organisasi pemerintah daerah
c. Organisasi parpol dan LSM
d. Organisasi yayasan
e. Organisasi pendidikkan dan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah
f. Organisasi tempat peribadatan[11].

Salah satu pengguna dana publik adalah pemerintah daerah, yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, tingkattan tertinggi dalam sektor publik adalah tingkatan negara. Oleh karenanya akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi

[11] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*,(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008), hal. 3-4

keuangan negara. Penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan sendirinya didanai oleh APBN (anggaran pendapatan belanja negara). Sedangkan penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai oleh daerah atas beban APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah)[12].

2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Secara teoritis, akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit lainnya. Organisasi sektor publik dapat dibatasi dengan organisasi-organisasi yang menggunakan dana masyarakat.

Di Indonesia mencakup beberapa bidang utama yaitu, Akuntansi Pemerintah Pusat, Akuntansi Pemerintah Daerah, Akuntansi Partai Politik dan LSM, Akuntansi Yayasan, Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan, dan Akuntansi Tempat Peribadatan.[13]

B. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

1. Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi, misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintah kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1). Jadi

---

[12] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba...*,hal.216

[13] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik …,* hal.19

secara umum tujuan Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Mengumpulkan dan mengalokasikan/mendistribusikan sumber daya

2. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. Indikator Kinerja Pemda, meliputi:

a. Indikator Masukan (inputs), misalnya;
    1) Jumlah dana yang dibutuhkan;
    2) Jumlah pegawai yang dibutuhkan;
    3) Jumlah infra struktur yang ada;
    4) Jumlah waktu yang digunakan.
b. Indikator proses (process), misalnya;
    1) Ketaatan pada peraturan perundangan;
    2) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
c. Indikator Keluaran (Output), misalnya;
    1) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan;
    2) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa;
d. Indikator hasil (Outcome), misalnya;
    1) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan;
    2) Produktivitas para karyawan atau pegawai.
e. Indikator manfaat (Benefit), misalnya;
    1) Tingkat kepuasan masyarakat;
    2) Tingkat partisipasi masyarakat.
f. Indikator Impact, misalnya;
    1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
    2) Peningkatan pendapatan masyarakat.

Karakteristik Pemda sebagai *pure nonprofit organisation* menempatkan organisasi ini mempunyai keunikan yang sangat berbeda dengan perusahaan bisnis. Pemda mempunyai tanggung jawab besar di bidang ekonomi dan sosial secara bersama. Pengukuran kinerja Pemda harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup:

6. Kondisi Ekonomi Nasional
    1) Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto.
    2) Produk domestik bruto riil per kapita.
    3) Tingkat tabungan.
    4) Defisit/surplus keuangan daerah.
    5) Utang dalam dan luar negeri.
    6) Cadangan emas dan devisa.
7. Lingkungan bisnis
    1) Indeks kebebasan ekonomi.
    2) Perlindungan hak milik.
    3) Indeks persepsi korupsi.
    4) Kebebasan bank.
8. Stabilitas dan Pengembangan
    1) Sebaran pendapatan.
    2) Paritas upah tenaga kerja pria/wanita.
    3) Tingkat pengangguran.
    4) Partisipasi politik.
    5) Jumlah pengungsi.
    6) Kepastian hukum.
    7) Jumlah kendaraan pribadi dan umum.
    8) Kondisi keamanan daerah.
9. Kesehatan
    1) Tingkat kelahiran.
    2) Harapan hidup.
    3) Tingkat kematian.

4) Program pemeliharaan kesehatan.
5) Pengeluaran untuk kesehatan.
6) Pebandingan penduduk dengan dokter/tenaga medis.
7) Kecukupan gizi penduduk.

10. Pendidikan
    1) Tingkat partisipasi pendidikan.
    2) Anggaran pendidikan.
    3) Kualitas tenaga pengajar.
    4) Kecukupan saran dan prasarana pendidikan.
    5) Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat.
    6) Pemerataan pendidikan.

3. Fokus Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja pemda berarti pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas dilingkungan pemda. Fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap satuan kerja atau entitas mencakup:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Struktur Organisasi dan Personalia
4. Program Kerja
5. Anggaran[14]

[14] Muhammad Mahsun, *Pungukuran kinerja Sektor Publik*,(Yogyakarta : BPFE,2013),hal195-198

C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pentingnya Laporan Keuangan Daerah

Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya.

Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan publikasian merupakan inti sari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkas, diklasifikasikan, dan dikelompokkan. Oleh karena itu, untuk mangetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong sehat atau sakit, kita dapat melihatnya dari laporan keuangannya.

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik;
2) Untuk alat akuntabilitas publik;
3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

3. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya;

b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;
c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaianya dengan peraturan perundan-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

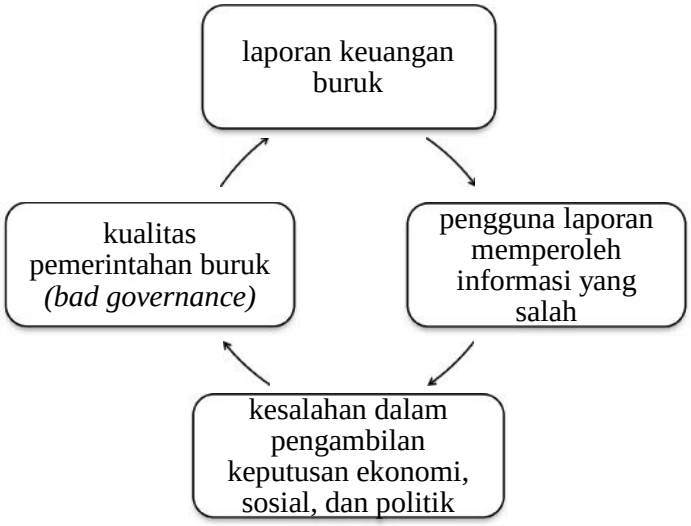
4. Perlunya Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk pembuatan keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan mengintepretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Dampak Pelaporan Keuangan Yang Buruk

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan publikasian tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan.

Gambar 2.1. lingkaran setan akibat laporan keuangan yang buruk



Pada gambar 2.1 tersebut bisa dijelaskan bahwa laporan keuangan yang buruk menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang salah dan menyesatkan. Apabila para pengguna tersebut sangat mengandalkan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan, maka sangat mungkin terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan. Atau resiko minimalnya keputusan yang diambil kurang berkualitas, meskipun tidak salah.

6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

a. Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.
b. Andal (*Reability*). Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi.

c. Dapat dibandingkan (*comparability*). Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.
d. Dapat dipahami (*understandability*). Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.[15]

7. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi:

a. Neraca
b. Laporan Operasional (LO)
c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
d. Laporan Arus Kas (LAK)
e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
h. Lampiran: laporan keuangan BUMD

Dari berbagai jenis laporan tersebut, biasanya yang dipublikasikan di media massa hanya laporan keuangan utama saja, yaitu neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas.[16]

D. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bukti pertanggung jawaban pemerintah terhadap daerahnya, yang menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja (APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan

---

[15] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.1-12

[16] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.67-68

Realisasi Anggaran menyajikan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiyaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. [17]

Laporan realisasi anggaran terdiri dari enam elemen (pos) utama, yaitu:

1. Pendapatan

Pendaptan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu:

a. Pendaptan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1) Pendapatan pajak daerah
2) Pendapatan Retribusi Daerah
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang Sah

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat berupa:
   a) Dana Perimbangan
   b) Dana Bagi Hasil Pajak
   c) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
   d) Dana Alokasi Umum
   e) Dana Alokasi Khusus
2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
   a) Dana Otonomi Khusus
   b) Dana Penyesuaian
3) Transfer Pemerintah Provinsi (khusus untuk pemerintah kabupaten/kota)
   a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
   b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

[17] Chrisman Youlli Karinda, *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, (Sulawesi, 2013), hal.2

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi:

1) Pendapatan Hibah
2) Pendapatan Dana Darurat
3) Pendapatan Lainnya

2. Belanja

Pos Belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi:

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang
3) Bunga
4) Subsidi
5) Hibah
6) Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

Belanja Modal meliputi:

1) Belanja Tanah
2) Belanja Peralatan dan Mesin
3) Belanja Gedung dan Bangunan
4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5) Belanja Aset Tetap Lainnya
6) Belanja Aset Lainnya

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga atau belanja lain-lain merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau rutin terjadi.

Belanja Tak Terduga bisa berupa:

1) Bantuan Bencana Alam
2) Bantuan Bencana Sosial

3) Bantuan Korban Politik

3. (Belanja) Transfer

Transfer pada dasarnya merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/kota
b. Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/kota
c. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/kota

Untuk pemerintah kabupaten/kota pengeluaran transfer berupa Transfer/Bagi hasil Pendapatan ke Desa, meliputi:

a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Retribusi
c. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

4. Surplus/Defisit

Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran.

5. Pembiayaan

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

1) Penggunaan SiLPA tahun lalu
2) Pencairan Dana Cadangan
3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4) Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
5) Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6) Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank

7) Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga keuangan bukan Bank
8) Pinjaman Dalam Negeri – Pengeluaran Obligasi Pemerintah Daerah
9) Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
10) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
11) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
12) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Pembentuk Dana Cadangan
2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
4) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank
6) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
7) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pemerintah Pusat
8) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
9) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
10) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
11) Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

6. SiLPA/SiKPA

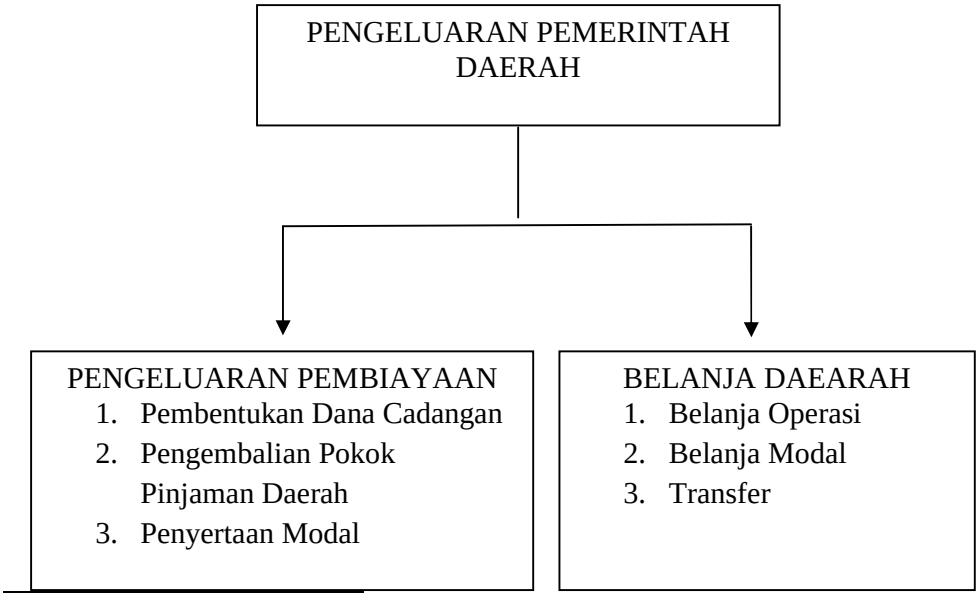
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah

selama periode anggaran. SiLPA/SiKPA dapat dihitung dari nilai pada pos Surplus/Defisit ditambah dengan Pembiayaan Neto.[18]

E. Belanja Daerah

1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.[19]Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan daerah menyebabkan berkurangnya kas di rekening Kas Umum Daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah.[20]



[18] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.73-76

[19] Anggota Ikapi, *Pedoman Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah,* (Bandung : Fokusmedia, 2008) ,hal.141

[20] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.153-154

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Perlindungan dan peningatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikkan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas jaminan sosial, dan fasilitas pelayanan umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah harus memprtimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetatapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[21]

a. Klasisifikasi Belanja untuk Pemerintah Daerah:
    1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
    2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
    3) Belanja lain-lain tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.[22]
b. Jenis – jenis Belanja Daerah:
    1) Belanja Tidak Langsung
        a) Belanja pegawai
        b) Belanja Bunga
        c) Belanja subsidi

---

[21] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba...*,hal.225

[22] Pemerintahan Republik Indonesia No 71 2010, *Standar akuntansi pemerintah (SAP),* (Bandung : Fokus Media, 2011), hal.322

d) Belanja Hibah dan bantuan sosial
e) Belanja bagi hasil
f) Belanja bantuan keuangan
g) Belanja tidak terduga

2) Belanja Langsung
a) Belanja pegawai, honorarium, upah, uang lembur
b) Belanja barang dan jasa
c) Belanja Modal[23]

2. Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja Daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara efisien. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa:

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Selisih disukai (*favourable varians*) dan
2) Selisih tidak disukai (*unfavourable varians*).[24]

---

[23] *Pedoman Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),* (Bandung : Fokusindo mandiri, 2014),Hal.33

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada umumnya belanja memiliki kecendrungan untuk selalu naik. Alasan kenaikkan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflansi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyusuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:[25]

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn t} = \frac{\text{aerah dapat dihitung dengan rumus ber}_{\text{ikut:}}{}^{25}}{\text{Realisasi Bel}_{\text{anja Thn t}-\text{Realisasi Belanja Thn}}{}^{t-1}}$$
$$\text{Realisasi belanja th t}-1$$

Analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengetahui perkembangan belanja suatu pemerintah dari satu tahun ketahun berikutnya, dan untuk menilai apakah kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran. Analisis pertumbuhan belanja dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan dan dikatakan tidak baik apabila pertumbuhannya negatif atau terjadi penurunan.[26]

---

[24] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.155

[25] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.158

[26] Oldison Santosa, dkk. *Analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset (DPKA) kabupaten sangihe*. Jurnal Emba Vol.2 No.3 September 2014.

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

1) Analisis Belanja per Fungsi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD. Dalam hal ini terdapat sembilan fungsi, yaitu:

a) Pelayanan Umum Pemerintahan
b) Ketertiban dan Keamanan
c) Ekonomi
d) Lingkungan Hidup
e) Perumahan dan Fasilitas Umum
f) Kesehatan
g) Pariwisata dan Budaya
h) Pendidikan
i) Perlindungan Sosial

Rasio belanja per fungsi terhadap total belanja di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi ...}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

3) Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja Merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Analisis belanja modal terhadap total belanja di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja } \frac{\text{Realisasi Belanja modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4) Analisis belanja langsung dan tidak langsung.

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost anf budgetary control*).. Rasio belanja langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja terhadap Total Belanja } = \frac{\text{total Belanja langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sedangkan belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tdk Langsung thd total belanja} = \frac{\text{Rasio Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja di digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan

efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan pemborosan anggaran.

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut[27] :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

F. Penelitian yang Relevan

pertama adalah penelitian Syarfini Ropita Nim 08 201 036 dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Studi kasus pada Dinas Pendapatan Penglolaan Keuangan Dan Aset. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di baik secara garis besar walaupun mengalami perubahan yang berfluktuasi pada periode 2009-2011. Ini dapat di lihat dalam merealisasikan pajak daerah yaitu sebesar 108% dan 10% dapat dikatakan sangat efektif dan sangat efisien, dan pertumbuhan pendapatan menunjukan pertumbuhan yang positif. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada saat ini masih bergantung pada pemberian pemerintah pusat sehingga penyelenggara desentralisasi masih rendah. Dalam penerapan realisasi elanja pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah cukup baik, hanya saja belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal.

Perbedaanya dengan yang penulis teliti adalah Syarfini Ropita menganalisis Laporan Realisasi Anggaran tahun 2009-2011, sedangkan penulis menganalisis Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2015.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Defvi Marta NIM 11 203 033 dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan

[27] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.161-165

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Mahasiswa program studi Ekonomi Syar'iah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.

Hasil penelitian menunjukan analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan tahun 2013-2014 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.

Perbedaanya dengan yang penulis teliti adalah, Defvi Marta hanya menganalisis tiga tahun Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penulis meneliti lima tahun Laporan Realisasi Anggaran.

G. Definisi operasional

Untuk memudahkan dalam mamahami proposal ini, penulis memaparkan beberapa pengertian dari istilah yang terkait dengan variabel penulis, yaitu:

1. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar. Merupakan suatu bentuk kinerja pemerintah dalam mengelola dan membelanjakan sumber keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya.
3. Laporan Realisasi Aanggaran merupakan bukti pertanggung jawaban pemerintah terhadap daerahnya, yang menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja (APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisai Aanggaran menyajikan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiyaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. [28]
4. Belanja daerah adalah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.[29]
5. Anggaran adalah rencana kerja organisasi yang diwujudkan dalam bentuk kualitatif, formal dan sistematis, dengan demikian anggaran merupakan rencana kerja organisasi dimasa mendatang.[30]

---

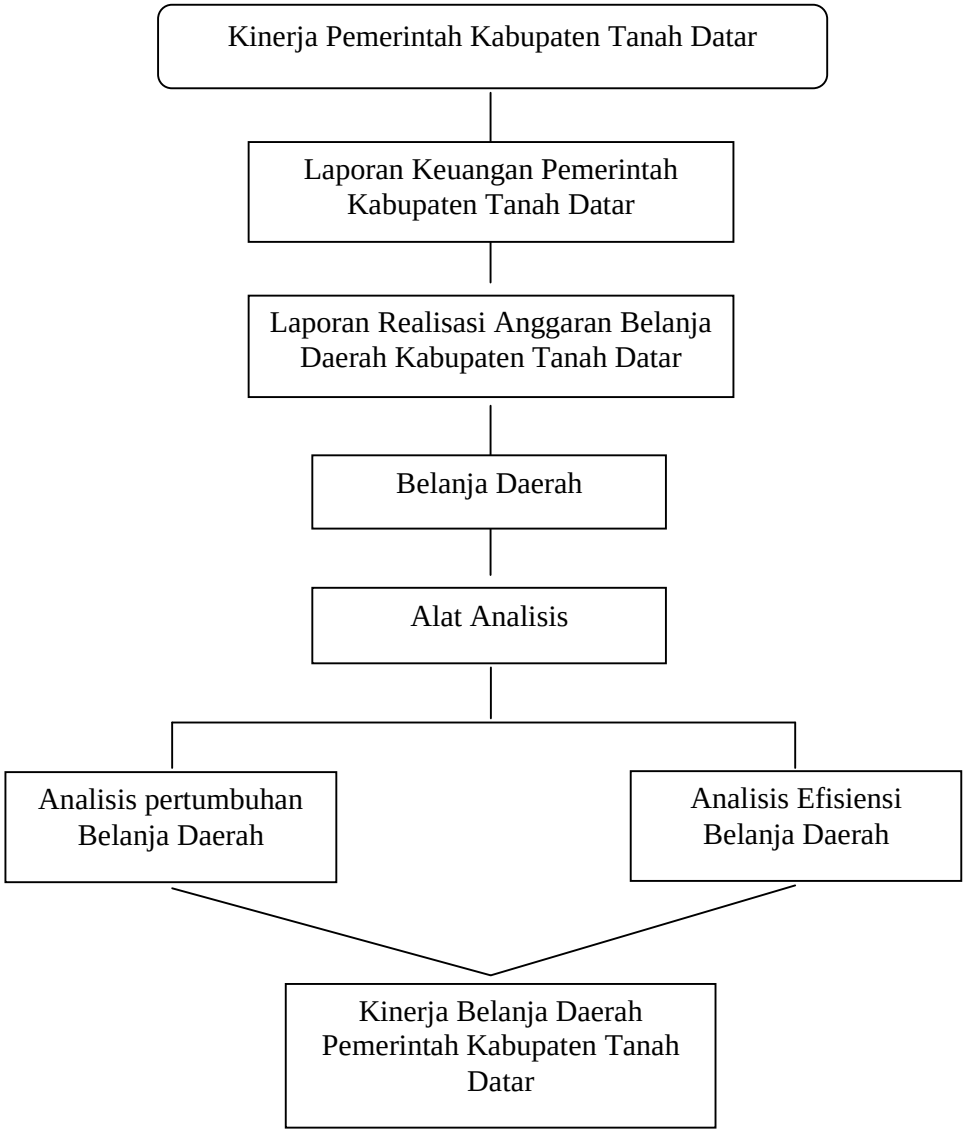
[28] Chrisman Youlli Karinda, *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, (Sulawesi, 2013), hal.2

[29] Anggota Ikapi, *Pedoman Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah* ,(Bandung : Fokusmedia, 2008) ,hal.141

[30] Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,2013), hal 64

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran terhadap data-data keuangan dari Kantor pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang penulis teliti kemudian mengolahnya dengan menggunakan alat analisis yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehingga penulis bisa mengetahui Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah menggunakan anggaran belanja daerah secara efisien dan mengetahui tingkat pertumbuhan belanja Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penelitian ini Penulis akan melakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan cara menganalisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sehingga Penulis bisa melihat Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sudah efisien dalam merealisasikan anggaran belanja daerah.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 16 November 2016 sampai 16 Januari 2017 tempat penelitian ini adalah di DPPKA Kabupaten Tanah Datar.

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis Pertumbuhan Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan 2015 ?
b. Untuk menganalisis Efisiensi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 sampai dengan 2015 ?

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang telah ada dan tidak perlu lagi secara langsung dikumpulkan oleh peneliti, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRA). Sumber data sekunder diperoleh di DPPKA Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang Penulis lakukan dengan cara metode dokumentasi, yang mana sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagianya.[31] Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang Penulis gunakan adalah analisis rasio keuangan dengan analisis deskriptif yaitu, analisis data dengan cara memberikan gambaran dari data yang tersedia untuk menjelaskan hasil dari penelitian yang Penulis lakukan.

Adapun analisa data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

   Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada umumnya belanja memiliki kecendrungan untuk selalu naik. Alasan kenaikkan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflansi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyusuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.

[31] BurhanBungin, *metedologi penelitian kuantitatif,* (Jakarta : Kencana,2011),hal.154

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:[32]

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn t} = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn t} - \text{Realisasi Belanja Thn t}-1}{\text{Realisasi belanja th t}-1}$$

Analisis pertumbuhan belanja bertujuan untuk mengetahui perkembangan belanja suatu pemerintah dari satu tahun ketahun berikutnya, dan untuk menilai apakah kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran. Analisis pertumbuhan belanja dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan dan dikatakan tidak baik apabila pertumbuhannya negatif atau terjadi penurunan.[33]

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Pertumbuhan Belanja

No	Analisis belanja	Ukuran	Kriteria
1	Pertumbuhan belanja	Positif	Baik
2	Pertumbuhan belanja	Negatif	Tidak baik

Sumber : Oldison Santosa, dkk. Jurnal Emba Vol.2 No.3 September 2014

[32] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.158

[33] Oldison Santosa, dkk. *Analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset (DPKA) kabupaten sangihe*. Jurnal Emba Vol.2 No.3 September 2014.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja di digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan pemborosan anggaran.

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:[34]

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Tingkat Efisiensi

Nilai Tingkat Efisiensi	Keterangan
< 100%	Efisien
= 100%	Efisiensi berimbang
> 100%	Tidak Efisien

Keterangan:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (× <100%) berarti **efisien**.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (× =100%) berarti **efisiensi berimbang**.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (× >100%) berarti **tidak efisien**.[35]

[34] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2016), hal.164

[35] Muhammad Mahsun, *Pungukuran kinerja Sektor Publik*,(Yogyakarta : BPFE,2013),hal186

Sedangkan menurut buku Mahmudi dengan judul (analisis laporan keuangan pemerintah daerah) lebih terperinci dalam mengukur tingkat Efisiensi bisa dilihat sebagai berikut:[36]

Tabel 3.3
Kriteria Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi	Keterangan
= < 90%	-Sangat Efisien
= 90% s.d 99%	-Efisien
= 100%	-Cukup Efisien
= > 100%	-Tidak Efisien

[36] Mahmudi, *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN, 2007),hal111

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Kantor DPPKA Kabupaten Tanah Datar

Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Salah satu tujuan dari pembentukan Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan dan Aset ini adalah agar pengelolaaan keuangan dan asset dapat dilakukan secara terpadu sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap Pendapatan Daerah .

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKKA) Kabupaten Tanah Datar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar . Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan aset dikelola secara terpadu.[37]

2. Visi dan Misi

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu :

Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal melalui pengelolaan Keuangan dan asset Daerah dengan Manajemen yang baik

[37] *Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar*.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. *Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab*
2. *Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat*
3. *Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien*

3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan[38]

a. Tujuan

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut diatas, maka sebagai penjabaran dari setiap Misi Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan pula sasaran dan kebijakan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, dengan dukungan data kuantitaf sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Disamping itu juga dirumuskan sasaran yang hendak dicapai selama waktu 5 Tahun.

Adapun Tujuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar yang mengaju kepada RPJM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 Visi 5 adalah:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, transparansi dan akuntabel

[38] *Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar.*

b. Sasaran

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka *Sasaran* yang akan dicapai selama tahun 2010-2015 adalah :

1) Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi
2) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan baik.

c. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keselurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam Strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengindentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efesian dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

d. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dann keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Kerja. Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan kebijakan dalam proses terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan baik sebagai berikut :

1) Meningkatkan fasilitasi permodalan dan manajemen usaha
2) Peningkatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan *tugas pokok* Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai berikut :

"Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset yang berdasarkan Azas Otonomi dan tugas pembantuan"

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 ditetapkan *fungsi* Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset, sebagai berikut :[39]

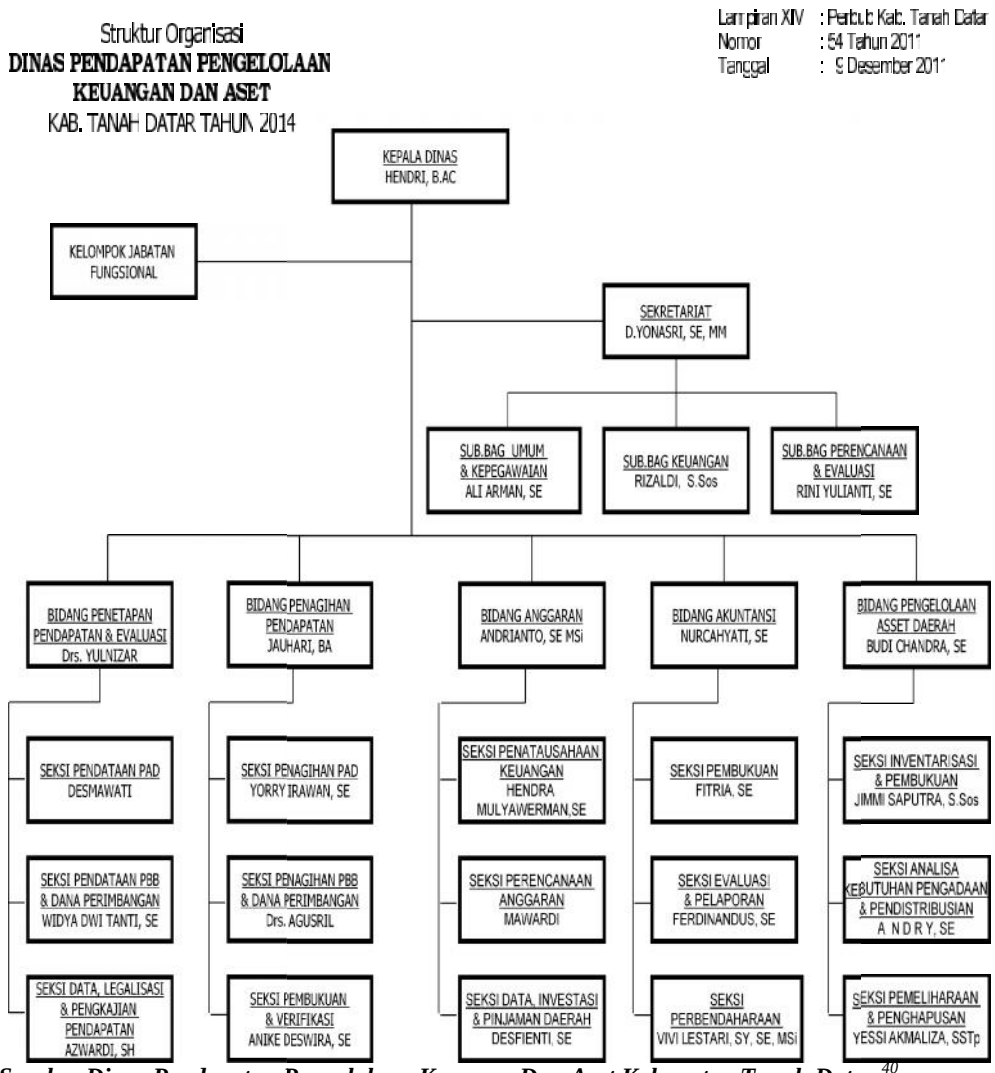
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang Penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akutansi dan pengelolaan aset daerah ;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah ;
c. Pembinaa dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah ;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

[39] *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 Ditetapkan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset.*

5. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DInas Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar seperti terlihat pada bagan berikut:



Sumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar.[40]

[40] *Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar*

b. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 meliputi unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris membawahi tiga Sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Sekretariat mempunyai Fungsi :

1) pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas;
2) pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan;
3) pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;
4) pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;
5) pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan; dan
6) pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

Unsur pelaksana pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada uraian berikut :

1) Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi, membawahi:[41]
   a) Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah,
   b) Seksi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Perimbangan
   c) Seksi Data, Legalitas dan Pengkajian Pendapatan.

[41] *Sumber Bidang Penetapan, Pendapatan Dan Evaluasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar*.

Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup penetapan pendapatan dan evaluasi.

Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
b) penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan;
c) perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
d) pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
e) pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f) pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; dan
g) pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

2) Bidang Penagihan Pendapatan membawahi :[42]
   a) Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah
   b) Seksi Penagihan PBB dan Dana Perimbangan,
   c) Seksi Pembukuan dan Verifikasi.

Bidang Penagihan Pendapatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup penagihan pendapatan Bidang Penagihan Pendapatan Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

a) pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;

[42] *Sumber Bidang Penagihan, Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar*.

b) penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan;
c) perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
d) pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
e) pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f) pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; dan
g) pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

3) Bidang Anggaran, membawahi :[43]
   a) Seksi Penatausahaan Keuangan
   b) Seksi Perencanaan Anggaran
   c) Seksi Data, investasi dan pinjaman daerah.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran;

Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
b) penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan;
c) perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
d) pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
e) pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f) pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; dan
g) pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

[43] *Sumber Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar*.

4) Bidang Akuntansi[44]

Bidang Akuntansi terdiri dari :

a) Sub Bidang Pembukuan,
b) Sub Bidang Perbendaharaan,
c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran;

Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
b) penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan;
c) perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
d) pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
e) pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f) pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; dan
g) pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

5) Bidang Pengelolaan Asset Daerah

Bidang Pengelolaan Asset Daerah terdiri dari :

a) Seksi Inventarisasi dan Pembukuan
b) Seksi Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
c) Seksi Pemeliharaaan dan Penghapusan

[44] *Sumber Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan Dan Aset Kabupaten Tanah Datar*.

Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran;

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
b) penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan;
c) perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
d) pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
e) pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f) pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan; dan
g) pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

6. UPT Pelayanan BPHTB & PBB

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.[45]

UPT BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan fungsi teknis dibidang BPHTB dan PBB serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. UPT BPHTB & PBB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

[45] *Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (Upt)*

Susunan Organisasi UPT BPHTB dan PBB sebagai berikut:

a. Kepala UPT;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Kepala UPT BPHTB dan PBB adalah sebagai berikut:

a. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB.
b. Melaksanakan pendataan, penilaian, dan penetapan BPHTB dan PBB.
c. Melaksanakan pengolahan data dan informasi BPHTB dan PBB.
d. Pelayanan BPHTB dan PBB sesuai dengan SOP yang berlaku.
e. Melaksanakan pemungutan BPHTB dan PBB.
f. Melaksanakan koordinasi dan pertemuan dengan instansi terkait.
g. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang BPHTB dan PBB.
h. Melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa ataupun permasalahan pemungutan BPHTB dan PBB.
i. Mengawasi, mengevaluasi dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidangnya.

B. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Dari Tahun 2011-2015

1. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

a. Temuan Penelitian

Dari tahun ke tahun belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu meningkat, oleh karena itu penulis akan menganalisis pertumbuhan belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja.

Analisis Pertumbuhan Belanja bertujuan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Analisis Pertumbuhan Belanja dikatakan baik jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

b. Hasil Penelitian

Berikut ini anggaran dan realisasi belanja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi
2011	Rp734.107.271.660,68	Rp661.965.798.533,80
2012	Rp809.818.357.564,97	Rp730.081.469.003,00
2013	Rp959.840.142.571,31	Rp856.376.208.798,66
2014	Rp1.087.354.767.167,27	Rp971.007.739.987,00
2015	Rp1.167.510.347.645,96	Rp1.033.176.232.576,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemrerintah Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015

Rasio yang digunakan untuk menganalisis Pertumbuhan Belanja adalah:

$$\text{Pertumbuhan Belanja th t} = \frac{\text{Realisasi Belanja th t} - (\text{Realisasi Belanja th t} - 1)}{\text{Realisasi belanja th t} - 1}$$

1) Pertumbuhan Belanja tahun 2011 $= \frac{661.965.798.533,80 - 568.631.590.454,00}{568.631.590.454,00}$

$= 0,16$

2) Pertumbuhan Belanja tahun 2012 $= \frac{730.081.469.003,00 - 661.965.798.533,80}{661.965.798.533,80}$

$= 0,10$

3) Pertumbuhan Belanja tahun 2013 $= \frac{856.376.208.798,66 - 730.081.469.003,00}{730.081.469.003,00}$

$= 0,17$

4) Pertumbuhan Belanja tahun 2014 $= \frac{971.007.739.987,00 - 856.376.208.798,66}{856.376.208.798,66}$

$= 0,13$

5) Pertumbuhan Belanja tahun 2015 $= \frac{1.033.176.232.576,00 - 971.007.739.987,00}{971.007.739.987,00}$

$= 0,06$

Tabel 4.2
Skala Pengukuran Pertumbuhan Belanja

No	Analisis belanja	Ukuran	Kriteria
1	Pertumbuhan belanja	Positif	Baik
2	Pertumbuhan belanja	Negatif	Tidak baik

Sumber : Oldison Santosa, dkk. Jurnal Emba Vol.2 No.3 September 2014

Tabel 4.3
Pertumbuhan Belanja
Tahun 2011-2015

Tahun	Total Realisasi Belanja	Pertumbuhan Belanja	(%)	Keterangan
2011	Rp661.965.798.533,80	0,16	16	Baik
2012	Rp730.081.469.003,00	0,10	10	Baik
2013	Rp856.376.208.798,66	0,17	17	Baik
2014	Rp971.007.739.987,00	0,13	13	Baik
2015	Rp1.033.176.232.576,00	0,06	6	Baik
Rata-rata		0,12	12	Baik

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015 yang diolah

Dari tabel pertumbuhan belanja diatas bisa dilihat belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang bernilai positif. Peningkatan pertumbuhan belanja pada tahun 2011 adalah 16% itu berarti pada tahun 2011 pertumbuhan belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar baik karena pertumbuhan belanjanya positif.

Pada tahun 2012 belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikkan, dari Rp 661.965.798.533,80 menjadi Rp 730.081.469.003,00. Tapi dari segi persentase, pertumbuhan belanja pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 16% menjadi 10%, meskipun mengalami penurunan, tetapi pertumbuhan belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih tergolong baik karena pertumbuhan belanjanya positif.

Pada tahun 2013 pertumbuhan belanja mengalami kenaikkan yaitu dari 10% menjadi 17%. Itu berarti pada tahun 2013 pertumbuhan belanja baik karena pertumbuhan belanjanya positif.

Pada tahun 2014 pertumbuhan belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 17% menjadi 13%. Meskipun mengalami penurunan, tetapi pertumbuhan belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih tergolong baik karena pertumbuhan belanjanya positif.

Pada tahun 2015 pertumbuhan belanja baik meskipun dari segi persentase terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu, dari 13% menjadi 6%.

Dari analisis pertumbuhan belanja diatas bisa dilihat persentase yang paling tinggi ada pada tahun 2011 dan tahun 2013 yaitu sebesar 17%, dan yang paling terendah ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 6%. Rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2011-2015 adalah 12%, itu berarti dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2011-2015 pertumbuhan belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar baik karena rata-rata yang dihasilkan bernilai positif.

C. Analisis Rasio Efisiensi Belanja pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011-2015.

1. Rasio Efisiensi Belanja

a. Temuan penelitian

Di setiap tahunnya belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu mengalami kenaikkan baik itu anggaran maupun realisasi belanjanya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan pengukuran kinerja terhadap penggunaan belanja berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam penelitian ini Penulis akan mengukur efisiensi penggunaan anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja.

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja. Rasio Efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat pengehematan Anggaran Belanja yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

b. Hasil Penelitian

Berikut ini anggaran dan realisasi belanja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.4
Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi
2011	Rp734.107.271.660,68	Rp661.965.798.533,80
2012	Rp809.818.357.564,97	Rp730.081.469.003,00
2013	Rp959.840.142.571,31	RP856.376.208.798,66
2014	Rp1.087.354.767.167,27	Rp971.007.739.987,00
2015	Rp1.167.510.347.645,96	Rp1.033.176.232.576,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015

Tabel 4.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi
2011	Rp615.803.874.912,53	Rp583.512.157.108,80
2012	Rp666.450.882.439,02	Rp618.271.478.434,00
2013	Rp784.452.906.728,00	Rp697.398.921.623,66
2014	Rp898.548.216.275,83	Rp808.384.032.897,00
2015	Rp996.440.733.761,96	Rp896.128.612.628,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015

Tabel 4.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi
2011	Rp115.834.646.748,15	Rp77.789.333.452,00
2012	Rp112.232.930.933,00	Rp86.485.201.226,00
2013	Rp138.387.221.009,00	Rp128.063.358.873,00
2014	Rp139.690.850.172,00	Rp123.046.706.609,00
2015	Rp168.528.566.229,00	Rp137.034.861.538,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015

Rasio Efisiensi Belanja Dihitung Dengan Rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4.7
Kriteria Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi	Keterangan
= <90%	- Sangat Efisien
= 90% s.d. 99%	- Efisien
= 100%	- Cukup Efisien
= >100%	- Tidak Efisien

1) Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{661.965.798.533,80}{734.107.271.660,68} \times 100\%$$

$$= 90,17\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Operasi} = \frac{583.512.157.108,80}{615.803.874.912,53} \times 100\%$$

$$= 94,76\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Modal} = \frac{77.789.333.452,00}{115.834.646.748,15} \times 100\%$$

$$= 67,16\%$$

Dari rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yaitu perbandingan antara realisasi belanja Rp661.965.789.533,80 dan anggaran belanja Rp734.107.271.660,68 hasil yang diperoleh 90,17%. Itu berarti pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merealisasikan belanjanya 90,17% dari belanja yang telah dianggarkan, dan mampu mengehemat 9,83% dari belanja yang dianggarkan. Dilihat dari tingkat efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar efisien dalam merealisasikan anggaran belanjanya, karena hasil rasio efisiensi belanja berada pada tingkat 90% s.d 99%.

Dari rasio efisiensi belanja operasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yaitu perbandingan antara realisasi belanja operasi Rp583.512.157.108,80 dengan anggaran belanja operasi Rp615.803.874.912,53 hasil yang diperoleh 94,76%. Itu berarti belanja operasi efisien, karena penghematan belanja operasi hanya sebesar 5,26% dari yang telah dianggarkan.

Dari pos-pos belanja operasi yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011 belanja pegawai terealisasi 96,00% (pada lampiran) dari anggaran yang ditetapkan, berarti belanja pegawai

efisien. Belanja barang terealisasi 87,82% (pada lampiran) dari anggaran yang ditetapkan, berarti belanja barang sangat efisien. Belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan efisien, karena terealisasi sebesar 91,66%, 94,92%, dan 95,43% (pada lampiran) dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari rasio efisiensi belanja modal Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 yaitu perbandingan antara realisasi belanja modal Rp77.789.333.452,00 dengan anggaran belanja modal Rp115.834.646.748,15 hasil yang diperoleh 67,16%. Itu berarti belanja modal sangat efisien karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

Dari pos-pos belanja modal terdapat di Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011 anggaran belanja tanah Rp2.554.650.000,00 tetapi tidak terealisasi (pada lampiran). Dampak dari tidak terealisasinya anggaran belanja tersebut adalah terganggunya dalam pencapaian kinerja, terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat capaian untuk pelayanan masyarakat berkurang. Belanja peralatan dan mesin terealisasi 64,89%. itu berarti belanja peralatan dan mesin sangat efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%. Belanja gedung dan bangunan juga sangat efisien, karena terealisasi sebesar 61,73%. Untuk bangunan yang tidak jadi dibangun atau dibeli dampaknya terganggu dalam pencapaian kinerja, terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat capaian untuk pelayanan masyarakat berkurang. Belanja jalan, irigasi dan jaringan juga sangat efisien, karena terealisasi sebesar 77,37% (pada lampiran). Begitu juga dengan belanja aset tetap lainnya sangat efisien, karena terealisasi sebesar 66,11% (pada lampiran) dari yang telah dianggarkan.

2) Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2012.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{730.081.469.003,00}{809.818.357.564,97} \times 100\%$$

$$= 90,15\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Operasi} = \frac{618.271.478.434,00}{666.450.882.439,02} \times 100\%$$

$$= 92,77\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Modal} = \frac{112.232.930.933,00}{86.485.201.226,00} \times 100\%$$

$$= 77,06\%$$

Perbandingan antara realisasi belanja Rp730.081.469.003,00 dengan anggaran belanja Rp809.818.357.564,97 dengan hasil 90,15%, itu berarti pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merealisasikan belanjanya 90,15%, dan pengehematan belanja yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 9,85% dari belanja yang sudah dianggarkan. Itu berarti belanja Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar efisien. Karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%.

Dari rasio efisiensi belanja operasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 yaitu perbandingan antara realisasi belanja operasi Rp618.271.478.434,00 dengan anggaran belanja operasi Rp666.450.882.439,02 hasil yang diperoleh 92,77%. Itu berarti belanja operasi efisien, karena mampu menghemat belanja operasi sebesar 7,23% dari yang telah dianggarkan. Dan jika dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%.

Dari pos-pos belanja operasi yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan efisien karena terealisasi sebesar 94,84%, 93,85%, dan 90,58% (pada lampiran) dari anggaran yang ditetapkan. Belanja

barang dan belanja bantuan sosial terealisasi 80,97% dan 82,82% (pada lampiran) dari anggaran yang ditetapkan. Itu berarti belanja barang dan belanja bantuan sangat efisien. Karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

Dari rasio efisiensi belanja modal Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 yaitu perbandingan antara realisasi belanja Modal Rp86.485.201.226,00 dengan anggaran belanja modal Rp112.232.930.933,00 hasil yang diperoleh 77,06%. Itu berarti belanja modal sangat efisien karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90% dan mampu menghemat belanja modal sebesar 22,94% dari yang telah dianggarkan.

Dari pos-pos belanja modal yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 anggaran belanja tanah Rp2.875.360.000,00 tetapi tidak terealisasi (pada lampiran). Dampak dari tidak terealisasinya anggaran belanja tersebut adalah terganggunya dalam pencapaian kinerja, terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat capaian untuk pelayanan masyarakat berkurang. Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar 88,01% (pada lampiran) dari anggaran yang telah ditetapkan, itu berarti belanja barang dan sangat efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%. Belanja bangunan dan gedung terealisasi sebesar 61,97% (pada lampiran) dari anggaran yang sudah ditetapkan, itu berarti belanja bangunan dan gedung juga sangat efisien. Untuk bangunan yang tidak jadi dibeli atau dibangun dampaknya terganggu dalam pencapaian kinerja, terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat capaian untuk pelayanan masyarakat berkurang. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan terealisasi sebesar 92,94% (pada lampiran) dari anggaran yang sudah ditetapkan, itu berarti belanja jalan, irigasi, dan jaringan efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%. Belanja aset tetap lainnya terealisasi sebesar 78,68% (pada lampiran) dari anggaran yang telah ditetapkan, itu berarti belanja aset tetap

lainnya sangat efisien. Karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

3) Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2013.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{856.376.208.798,66}{959.840.142.571,31} \times 100\%$$

$$= 89,22\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Operasi} = \frac{697.398.921.623,66}{784.452.906.728,00} \times 100\%$$

$$= 88,90\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Modal} = \frac{128.063.358.873,00}{138.387.221.009,00} \times 100\%$$

$$= 92,54\%$$

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merealisasikan belanjanya 89,22% dan mampu menghemat 10,78% belanja dari yang telah dianggarkan. Dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%. Itu berarti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat efisien dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

Dari rasio efisiensi belanja operasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 yaitu perbandingan antara realisasi belanja operasi Rp697.398.921.623,66 dengan anggaran belanja operasi Rp784.452.906.728,00 hasil yang diperoleh 88,90%. Itu berarti belanja operasi sangat efisien, karena mampu menghemat belanja operasi sebesar 11,1% dari yang telah dianggarkan. Dan dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

Dari pos-pos belanja operasi yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran, belanja pegawai efisien karena terealiasi 90,45% (pada lampiran). Belanja barang terealisasi sebesar 80,55% (pada lampiran), dari anggaran yang telah ditetapkan, yang berarti belanja barang

sangat efisien, karena dilihat dari tingkat efsiensi berada pada tingkat <90%. Belanja hibah terealisasi paling tinggi yaitu 93,25% (pada lampiran). Itu berarti belanja hibah efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%. Belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan terealisasi 86,79% dan 87,95% (pada lampiran), dari anggaran yang telah ditetapkan. Itu berarti belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan juga sangat efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi yang berada pada tingkat <90%.

Dari rasio efisiensi belanja modal Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2013 yaitu perbandingan antara realisasi belanja modal Rp128.063.358.873,00 dengan anggaran belanja modal Rp138.387.221.009,00 hasil yang diperoleh 92,54%. Itu berarti belanja modal efisien karena mampu menghemat belanja modal sebesar 7,46% dan dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%.

Dari pos-pos belanja modal yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran, belanja tanah terealisasi sebesar 52,53% (pada lampiran). Itu berarti belanja tanah sangat efisien, dilihat dari tingkat nilai efisiensi yang berada pada tingkat <90%. Untuk belanja tanah yang tidak jadi dibeli dampaknya terganggu dalam pencapaian kinerja, terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat capaian untuk pelayanan masyarakat berkurang. Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar 82,63% (pada lampiran), yang berarti belanja peralatan dan mesin juga sangat efisien. Belanja bangunan, geduang dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan terealisasi sebesar 94,97% dan 95,91% (pada lampiran), itu berarti belanja bangunan, gedung dan belanja irigasi, dan jaringan efisien. Karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%.

4) Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2014

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{971.007.739.987,00}{1.087.354.767.167,27} \times 100\%$$

$$= 89,30\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Operasi} = \frac{808.384.032.897,00}{898.548.216.275,83} \times 100\%$$

$$= 88,97\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Modal} = \frac{123.046.706.609,00}{139.690.850.172,00} \times 100\%$$

$$= 88,09\%$$

Dari rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2014 bisa dilihat penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah 10,7%. Itu dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja sebesar Rp971.007.739.987,00 dengan anggaran belanja sebesar Rp1.087.354.767.167,27 yang hasilnya 89,30%. Dilihat tingkat efisiensi belanja berada pada tingkat <90%. Jadi pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat efisien dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

Dari rasio efisiensi belanja operasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2014 yaitu perbandingan antara realisasi belanja operasi Rp808.384.032.897,00 dengan anggaran belanja operasi Rp898.548.216.275,83 hasil yang diperoleh 89,97%. Itu berarti belanja operasi sangat efisien, karena mampu menghemat belanja operasi sebesar 10,03%. Dan dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

Dilihat dari pos-pos belanja operasi yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran, belanja pegawai terealisasi 92,43% (pada lampiran) itu berarti belanja pegawai efisien. Karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%. Belanja barang,

belanja hibah, dan belanja bantuan sosial terealisasi sebesar 80,25%, 89,51%, dan 83,00% (pada lampiran). Itu berarti belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sangat efisien karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

Dari rasio efisiensi belanja modal Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2014 yaitu perbandingan antara realisasi belanja modal Rp123.046.706.609,00 dengan anggaran belanja modal Rp139.690.850.172,00 hasil yang diperoleh 88,09%. Itu berarti belanja modal sangat efisien karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90% dan mampu menghemat belanja modal sebesar 11,91%.

Dari pos-pos belanja modal yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran, anggaran belanja tanah Rp718.000.000,00 tetapi tidak terealisasi dari yang telah dianggarkan (pada lampiran). Dampak dari tidak terealisasinya anggaran belanja tersebut adalah terganggunya dalam pencapaian kinerja, terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat capaian untuk pelayanan masyarakat berkurang. Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar 76,19% (pada lampiran). Itu berarti belanja peralatan dan mesin sangat efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%. Belanja bangunan, gedung dan belanja jalan, irigasi dan jaringan terealisasi 96,43% dan 96,83% (pada lampiran). Itu berarti belanja bangunan, gedung dan belanja jalan, irigasi dan jaringan efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%. Belanja aset tetap lainnya terealisasi 37,17% (pada lampiran). Itu berarti belanja aset tetap lainnya juga sangat efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

5) Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{1.033.176.232.576,00}{1.167.510.347.645,96} \times 100\%$$

$$= 88,49\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Operasi} = \frac{896.128.612.628,00}{996.440.733.761,96} \times 100\%$$

$$= 88,93\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Modal} = \frac{137.034.861.538,00}{168.528.566.229,00} \times 100\%$$

$$= 81,31\%$$

Pada tahun 2015 pengehematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah 11,51%, itu dilihat dari belanja yang terealisasi adalah 88,49% yang merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi belanja Rp1.033.176.232.576,00 dengan anggaran belanja Rp1.167.510.347.645,96. Itu berarti belanja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat efisien. Karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

Dari rasio efisiensi belanja operasi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 yaitu perbandingan antara realisasi belanja operasi Rp896.128.612.628,00 dengan anggaran belanja operasi Rp996.440.733.761,96 hasil yang diperoleh 89,93%. Itu berarti belanja operasi sangat efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%. Dan mampu menghemat belanja operasi sebesar 10,07%.

Dari pos-pos belanja operasi di Laporan Realisasi Anggaran, belanja pegawai terealisasi 91,73% (pada lampiran). Itu berarti belanja pegawai efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%. Belanja barang, jasa dan belanja hibah terealisasi 84,60% dan 87,28% (pada lampiran), itu berati belanja

barang, jasa dan belanja hibah sangat efisien. Karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%. Belanja bantuan sosial terealisasi 29,72% (pada lampiran). Itu berarti belanja bantuan sosial juga sangat efisien.

Dari rasio efisiensi belanja modal Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 yaitu perbandingan antara realisasi belanja modal Rp137.034.861.538,00 dengan anggaran belanja modal Rp168.528.566.229,00 hasil yang diperoleh 81,31%. Itu berarti belanja modal sangat efisien karena mampu menghemat belanja modal sebesar 18,69%. Dan dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%.

Dari pos-pos belanja modal di Laporan Realisasi Anggaran, belanja tanah terealisasi sebesar 45,03% (pada lampiran), itu berarti belanja tanah sangat efisien, dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%. Untuk belanja tanah yang tidak jadi dibeli dampaknya terganggu dalam pencapaian kinerja, terganggunya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat capaian untuk pelayanan masyarakat berkurang. Belanja peralatan dan mesin terealisasi 82,89% (pada lampiran), itu berarti belanja peralatan dan mesin juga sangat efisien. Belanja gedung dan bangunan terealisasi 93,63% (pada lampiran), itu berarti belanja gedung dan bangunan efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat 90% s.d. 99%. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan terealisasi 78,60% (pada lampiran), itu berarti belanja jalan, irigasi, dan jaringan sangat efisien, karena dilihat dari tingkat efisiensi berada pada tingkat <90%. Belanja aset tetap lainnya dan belanja BLUD terealisasi sebesar 49,35% dan 55,82% (pada lampiran). Itu berarti belanja aset tetap lainnya dan belanja BLUD juga sangat efisien.

Tabel 4.8
Rasio Efisiensi Belanja
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Penghematan	Keterangan
2011	Rp734.107.271.660,68	Rp661.965.798.533,80	90,17%	9,83%	Efisien
2012	Rp809.818.357.564,97	Rp730.081.469.003,00	90,15%	9,85%	Efisien
2013	Rp959.840.142.571,31	Rp856.376.208.798,66	89,22%	10,78%	Sangat Efisien
2014	Rp1.087.354.767.167,27	Rp971.007.739.987,00	89,30%	10,7%	Sangat Efisien
2015	Rp1.167.510.347.645,96	Rp1.033.176.232.576,00	88,49%	11,51%	Sangat Efisien
Rata-Rata			89,46%	10,54%	Sangat Efisien

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah

Dilihat dari tabel rasio efisiensi belanja dari tahun 2011 sampai tahun 2015, belanja daerah yang paling tinggi realisasinya ada pada tahun 2015 yaitu Rp1.033.176.232.576,00 dan anggaran belanja Rp1.167.510.347.645,96 atau belanja yang terealiasasi 88,49%, penghematan paling kecil yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan anggaran belanja dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah tahun 2011 yaitu anggaran belanja yang terealisasi 90,17% dan menghemat anggaran belanja 9,83%, Sedangkan penghematan yang paling besar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan anggaran belanja daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah tahun 2015, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mampu mengehemat sebesar 11,51%.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah mampu melakukan penghematan karena tidak ada belanja daerahnya yang melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Jika dilihat dari rata-rata rasio efisiensi belanja daerah yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat efisien dalam merealisasikan belanjanya.

Tabel 4.9
Rasio Efisiensi Belanja Operasi
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran Belanja Operasi	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Efisiensi	Penghematan	Keterangan
2011	Rp615.803.874.912,53	Rp583.512.157.108,80	94,76%	5,24%	Efisien
2012	Rp666.450.882.439,02	Rp618.271.478.434,00	92,77%	7,23%	Efisien
2013	Rp784.452.906.728,00	Rp697.398.921.623,66	88,90%	11,1%	Sangat efisien
2014	Rp898.548.216.275,83	Rp808.384.032.897,00	89,97%	10,03%	Sangat efisien
2015	Rp996.440.733.761,96	Rp896.128.612.628,00	89,93%	10,07%	Sangat efisien
Rata-Rata			91,26%	8,74%	Efisien

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah

Dilihat dari tabel rasio efisiensi belanja operasi dari tahun 2011 sampai tahun 2015, belanja operasi yang paling tinggi realisasinya adalah tahun 2015 yaitu Rp896.128.612.628,00 dengan anggaran belanja Rp996.440.733.761,96, atau belanja operasi yang terealiasasi 89,93%, penghematan paling kecil yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan anggaran belanja operasi dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah tahun 2011 yaitu anggaran belanja operasi yang terealisasi 94,76% dan menghemat anggaran belanja operasi 5,24%, Sedangkan penghematan yang paling besar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan anggaran belanja operasi dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah tahun 2013, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mampu menghemat sebesar 11,1%.

Jika dilihat dari rata-rata rasio efisiensi belanja operasi yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar efisien dalam merealisasikan belanjanya, karena rasio rata-rata efisiensi belanja operasi adalah 91,26%.

Tabel 4.10
Rasio Efisiensi Belanja Modal
Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Rasio Efisiensi	Penghematan	Keterangan
2011	Rp115.834.646.748,15	Rp77.789.333.452,00	67,16%	32,84%	Sangat Efisien
2012	Rp112.232.930.933,00	Rp86.485.201.226,00	77,06%	22,94%	Sangat Efisien
2013	Rp138.387.221.009,00	Rp128.063.358.873,00	92,54%	7,46%	Efisien
2014	Rp139.690.850.172,00	Rp123.046.706.609,00	88,09%	11,91%	Sangat Efisien
2015	Rp168.528.566.229,00	Rp137.034.861.538,00	81,31%	18,69%	Sangat Efisien
Rata-Rata			81,23%	18,77%	Sangat Efisien

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah

Dilihat dari tabel rasio efisiensi belanja modal dari tahun 2011 sampai tahun 2015, Belanja Modal yang paling tinggi realisasinya adalah tahun 2015 yaitu Rp137.034.861.538,00 dengan anggaran belanja modal Rp168.528.566.229,00 atau belanja modal yang terealiasasi 81,31%. Penghematan paling kecil yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan anggaran belanja modal dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah tahun 2013 yaitu anggaran belanja modal yang terealisasi 92,54% dan menghemat anggaran belanja modal sebesar 7,46%, Sedangkan penghematan yang paling besar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam merealisasikan anggaran belanja modal dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah tahun 2011, pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mampu mengehemat 32,84%.

Jika dilihat dari rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Modal yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat efisien dalam merealisasikan belanja modalnya, karena rata-rata rasio efisiensi belanja modal adalah 81,23%.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini Penulis bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan belanja, tingkat efisiensi dalam merealisasikan anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar periode 2011 sampai 2015.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil penelitian di bab sebelumnya, penulis menyimpulkan :

1. Pertumbuhan belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar baik, karena dari hasil penelitian Pertumbuhan belanja dari tahun 2011 sampai tahun 2015 yaitu pada tahun 2011 pertumbuhan belanja adalah 16% itu berarti baik, karena mengalami pertumbuhan positif. pada tahun 2012 pertumbuhan belanja adalah 10% meskipun dari segi persentase turun, tapi pertumbuhan belanja masih tergolong baik. Pada tahun 2013 pertumbuhan belanja 17% itu berarti baik, karena mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan tahun 2012%. Pertumbuhan belanja pada tahun 2014 adalah 13% itu berarti baik, meskipun pertumbuhan belanja tahun 2014 lebih kecil dibanding tahun 2013. Dan pertumbuhan belanja pada tahun 2015 adalah 6% itu berarti pertumbuhan belanja baik. Rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2011-2015 adalah 12%, itu berarti pertumbuhan belanja di Pemerintah Kabuaten Tanah Datar adalah baik karena rata-rata yang dihasilkan bernilai positif.
2. Realisasi anggaran belanja di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011-2015 sangat efisien, itu dilihat dari hasil penelitian dalam realisasi anggaran belanja. pada tahun 2011 belanja yang terealisasi 90,17%. Pada tahun 2012 belanja yang terealisasi 90,15%. Pada tahun 2013 belanja yang terealisasi adalah 89,22%, pada tahun 2014 belanja yang terealisasi 89,30%, dan pada tahun 2015 belanja yang terealisasi adalah 88,49%. Rata-rata belanja di Pemerintah Kabuaten Tanah Datar

adalah 89,466%. Itu berarti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat efisin dalam merealisasikan anggaran belanjanya, karena rasio yang dihasilkan berada pada skala <90%.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk lebih memperhatikan dalam merealisasikan anggaran belanjanya, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja dari tahun ketahun dan tidak ada penurunan belanja yang bernilai negatif.
2. Pemerintah Kabuaten Tanah Datar lebih memperhatikan dalam merealisasikan belanjanya, agar lebih efisien ke tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Valen Lumingkewas.(2013).*Pengakuan Pendapatan dan Beban atas Laporan Keuangan pada PT. Bank Sulut*.Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Anggota Ikapi.(2008).*Pedoman Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah,*Bandung : Fokusmedia.

Bastian Indra, *Akuntansi Sektor Publik,*Bandung : PT. Gelora Aksara Pratama

Bungin Burhan.(2011).*metedologi penelitian kuantitatif,* Jakarta : Kencana.

Halim Abdul.(2007).*akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah,* Yogyakarta : UPP STIM Yogyakarta.

Mahmudi.(2016).*Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.

Mahsun Mohamad.(2013),*pengukuran kinerja sektor publik,* Yogyakarta : BPFE

Mardiasmo.(2009).*akuntansi sektorpublic*.Yogakarta: CV. Andi Offset.

Murni Wahid.(2007).*Manajemen Perubahan Bisnis*, Malang : UIN Malang Press.

Quraish Shihab M.(2000).*Tafsir Al- Misbah"pesan, Kesan, dan keserasian Alqur'an",* Jakarta : Lentera Hati.

Nur Afiah Nunuy.(2010). *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,* Jakarta: Kencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010

Pemerintahan Republik Indonesia No 71 2010.(2011)*Standar akuntansi pemerintah SAp*.Bandung : Fokus Media.

Pedoman Penyusunan APBD.(2014) *(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).*Bandung : Fokusindo mandiri.

RenyowijoyoMuindro,(2008).*Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*.Jakarta : Mitra Wacana Media.

Rudianto,(2013).*Akuntansi Manajemen*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Santosa Oldison, dkk. *Analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset (DPKA) kabupaten sangihe*. Jurnal Emba Vol.2 No.3 September 2014.

Standar Akuntansi Pemerintah.(2011).*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010.* Bandung : Fokusmedia.

Sofyan Syafri Harahap.(2011).*Teori AkuntansiEdisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syamrin.(2012).*Pengantar Akuntansi edisi revisi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ulum Ihyaul.(2009).*Audit Sektor Publik Suatu Pengantar.* Jakarta : BumiAksara.

Yani Ahmad.(2008).*Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Indonesia, EdisiRevisi*.Jakarta : PT RajaGrafindo.

Youlli Karinda Chrisman.(2013). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Sulawesi.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
IAIN BATUSANGKAR
Jl. Sudirman No.137 Kubu rajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website :www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: data.p3m@gmail.com

15 November 2016

Nomor : B- 0906/In.27/L.I/TL.00/ 11 /2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian***

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar

Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	: Edi Chandra / 11203038
Tempat/Tanggal Lahir	: Bongkal Malang, 21 September 1992
Kartu Identitas	: 1402032109920001
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Dusun II Bongkal Malang RT.005/003 Nagari Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	: ***Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belajar Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar***
Lokasi	: Kantor DPPKA Kab. Tanah Datar
Waktu	: 16 November 2016 s.d 16 Januari 2017
Dosen Pembimbing I	: Elfina Yenti, SE., M.Si., Akt., CA.
Dosen Pembimbing II	: Sri Adella Fitri, SE., M.Si.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.
NiP. 197308191998031001

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Telp. (0752) 71160, Fax. 71160
BATUSANGKAR

SURAT KETERANGAN

Nomor: 900 / 035 /BKD-2017

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa :

Nama	: **EDI CHANDRA**
Tempat/ Tgl Lahir	: Bongkal Malang, 21 September 1992
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 11203038
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Alamat	: Simpang Patai, Rambatan

Telah melakukan Penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Tanggal 16 November 2016 s.d 16 Januari 2017 dengan judul **"ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR"**.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2017

An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

RINI YULIANTI, SE
NIP. 19730505 199403 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/1009 /KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri RI No.64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitiandan surat Rektor IAIN Batusangkar Nomor : B-090.B/In.27/L.I/TL.00/11/2016, tanggal 15 November 2016 perihal Surat rekomendasi Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: **EDI CHANDRA**
Tempat/Tgl. Lahir	: Bongkal Malang, 21 September 1992
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Simpang Patai, Rambatan
Kartu Identitas	: KTP. 1402032109920001
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: **"ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR"**
Lokasi Penelitian	: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
W a k t u	: 16 November 2016 s.d 16 Januari 2017
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitianagar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 16 November 2016 s.d 16 Januari 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 17 November 2016

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBBAG TATA USAHA,

EVAWATI ZAKARIA, S.Sos
NIP. 19710328 200801 1 001

Tembusan
Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Tanah datar di Batusangkar.
5. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
6. Yang Bersangkutan.